BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stunting pada anak balita masih menjadi salah satu persoalan pembangunan yang belum terselesaikan secara tuntas di Indonesia. Dalam perspektif Administrasi Publik, persoalan ini tidak semata-mata merupakan urusan sektor kesehatan, melainkan juga mencerminkan seberapa efektif pemerintah mampu merancang, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan kebijakan publik secara lintas sektor. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, yang diukur berdasarkan standar tinggi badan sesuai usia yang ditetapkan pemerintah dan menjadi indikator kegagalan implementasi program gizi di tingkat akar rumput.

Secara teknis, masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mencakup periode kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak merupakan jendela intervensi yang paling kritis. Oleh karena itu, program percepatan penurunan stunting menuntut adanya koordinasi kelembagaan yang kuat, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komunikasi program yang efektif dari tingkat pusat hingga ke pelaksana di lapangan agar intervensi tepat waktu dan tepat sasaran (BRIN, 2023).

Tabel 1. 1
Periode Kritis 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Dalam Kandungan	0 – 6 Bulan	6 – 24 Bulan
270 Hari	**180 Hari**	**550 Hari**
Gizi ibu hamil, ANC, suplementasi zat besi dan folat.	ASI eksklusif, stimulasi dini, imunisasi dasar.	MP-ASI bergizi, tumbuh kembang, pemantauan rutin posyandu.

Sumber: Pusat Riset Kependudukan BRIN (2023); Perpres No. 72 Tahun 2021

Dari sudut pandang Administrasi Publik, dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas sumber daya manusia menjadikan persoalan ini sebagai agenda pembangunan yang memerlukan respons kebijakan terkoordinasi dan lintas sektor. Keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada tersedianya intervensi medis, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola program mulai dari kejelasan regulasi, efektivitas komunikasi antarinstansi, kecukupan sumber daya pelaksana, kepatuhan terhadap SOP, hingga sinergi di antara berbagai lembaga yang terlibat (BRIN, 2023).

Tabel 1. 2
Tren Prevalensi Stunting Nasional Tahun 2019–2024

Tahun	Sumber Data	Prevalensi Nasional	Target RPJMN
2019	Riskesdas / SSGBI	27,7%	24,1%
2021	SSGI 2021	24,4%	21,1%
2022	SSGI 2022	21,6%	18,4%
2023	SKI 2023	21,5%	17,0%
2024	SSGI 2024	**19,8% ↓**	14,0% (tidak tercapai)

Sumber: BKPK Kemenkes RI (2024); Tim Percepatan Penurunan Stunting/TP2S (2025)

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam upaya mengatasi persoalan stunting. Berbagai data menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting secara nasional mengalami tren penurunan yang cukup konsisten dari waktu ke waktu. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2024, angka prevalensi stunting

nasional tercatat sebesar 19,8%, turun dari posisi 21,5% pada tahun 2023. Capaian ini merupakan buah dari rangkaian intervensi yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama lima tahun terakhir, di mana angka stunting nasional berhasil ditekan dari 27,7% pada 2019 menjadi 19,8% pada 2024 (BKPK Kemenkes RI, 2024). Penurunan hampir delapan poin persentase dalam rentang lima tahun tersebut mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menempatkan penanganan stunting sebagai agenda pembangunan yang diprioritaskan.

Meskipun tren penurunan angka stunting nasional menunjukkan arah yang positif, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah dalam dokumen perencanaan nasional. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 awalnya menetapkan target penurunan stunting hingga 14% pada akhir tahun 2024. Namun, target tersebut tidak berhasil dicapai, sehingga pemerintah kemudian menetapkan target baru sebesar 14,2% pada tahun 2029 sesuai RPJMN 2025-2029. Target untuk tahun 2025 sendiri ditetapkan sebesar 18,8%, yang berarti masih diperlukan kerja keras dan kolaborasi yang jauh lebih erat dari seluruh pemangku kepentingan di semua tingkatan pemerintahan (Tim Percepatan Penurunan Stunting/TP2S, 2025). Selain itu, fakta bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah absolut balita stunting tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 638.000 balita, semakin menegaskan urgensi percepatan penanganan di seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi ini, termasuk Kabupaten Cirebon.

Tabel 1. 3
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

No.	Pilar	Deskripsi
1	**Komitmen & Kepemimpinan**	Penguatan komitmen pemerintah di semua tingkatan mulai dari nasional hingga desa/kelurahan.

No.	Pilar	Deskripsi
2	**Kampanye & Perubahan Perilaku**	Sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi pada 1.000 HPK, pola asuh, dan sanitasi lingkungan.
3	**Konvergensi Program**	Sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar intervensi berjalan terpadu.
4	**Penguatan Ketahanan Pangan & Gizi**	Peningkatan akses pangan bergizi bagi keluarga berisiko melalui program bantuan pangan, fortifikasi, dan pemberdayaan pangan lokal.
5	**Pemantauan & Evaluasi Berbasis Data**	Penggunaan data hasil penimbangan, SSGI, dan sistem EPPGBM sebagai dasar pengambilan keputusan dan intervensi terukur.

Sumber: Perpres No. 72 Tahun 2021; stunting.go.id (2025)

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Merespons permasalahan stunting yang bersifat multisektoral, pemerintah Indonesia telah memperkuat landasan hukum pelaksanaan program percepatan penurunan stunting melalui penerbitan regulasi yang komprehensif. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, hadir sebagai payung hukum utama yang mengatur pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara nasional dengan pendekatan yang bersifat holistik, integratif, dan lintas sektor. Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan kepada sektor kesehatan saja, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, Perpres ini juga menegaskan pentingnya keberadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

yang dibentuk secara berjenjang dari tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan sebagai motor penggerak pelaksanaan program di lapangan. Dengan adanya TPPS di setiap level pemerintahan, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan percepatan penurunan angka stunting secara nyata.

Tabel 1. 4
Perkembangan Prevalensi Stunting di Kabupaten Cirebon

Tahun	Sumber	Prevalensi / Jumlah	Keterangan
2023	Penimbangan Balita	13.535 balita (7,97%)	Data e-PPGBM Kabupaten Cirebon
2023	SKI 2023 (BKKBN)	**22,9% ↑**	Naik 4,3 poin dari 18,6%
2024	SSGI 2024	**18% ↓**	Turun ±5 poin; masih perlu kerja keras

Sumber: cirebonkab.go.id (2024); kacenews.id (2024); jabar.jpnn.com (2025)

Secara operasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mewajibkan pemerintah di semua tingkatan untuk menjamin ketersediaan anggaran, menetapkan mekanisme koordinasi yang jelas, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data yang terstandarisasi. Regulasi ini secara eksplisit mendorong konvergensi program antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pendekatan lintas sektor yang terstruktur. Dalam tataran implementasi, kerangka ini menuntut keberadaan SOP yang jelas di setiap level, kapasitas SDM yang memadai, serta koordinasi yang sinergis antar instansi mulai dari Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Sosial, PKK, pemerintah kecamatan, hingga kader posyandu di level desa.

Di level daerah, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menghadapi tantangan serius dalam penanganan stunting. Data hasil kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 mencatat bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting di Kabupaten Cirebon mencapai 13.535 balita atau setara dengan 7,97% dari total balita yang ditimbang. Angka ini kemudian diperkuat oleh data dari Survei Status Gizi Indonesia (SKI) tahun 2023 yang menunjukkan kondisi yang lebih mengkhawatirkan, di mana prevalensi stunting Kabupaten Cirebon tercatat sebesar 22,9%, naik 4,3 poin dari angka sebelumnya yang berada di posisi 18,6% (kacenews.id, 2024). Kenaikan yang signifikan ini melampaui rata-rata provinsi dan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah dengan beban stunting yang cukup berat di Jawa Barat. Kabar baiknya, berdasarkan data terbaru SSGI 2024, angka prevalensi stunting Kabupaten Cirebon berhasil ditekan kembali menjadi 18%, turun sekitar 5 poin dibandingkan angka tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tersebut masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang lebih intensif dari seluruh pemangku kepentingan.

Persoalan stunting di Kabupaten Cirebon tidak merata di seluruh wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui tim analisis yang dibentuk khusus telah memetakan daerah-daerah yang memerlukan intervensi prioritas. Dari hasil analisis tersebut, ditetapkan sebanyak 20 desa yang tersebar di 9 kecamatan sebagai desa prioritas khusus penanganan stunting pada tahun 2023, yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi serta tingkat kerentanan masyarakat di wilayah tersebut. Tingginya angka stunting di sejumlah kecamatan ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam efektivitas pelaksanaan program di masing-masing wilayah, yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kualitas koordinasi antar lembaga di tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan Klangenan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon turut menghadapi dinamika serupa dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

Kecamatan Klangenan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki infrastruktur pelayanan gizi masyarakat yang cukup luas.

Berdasarkan data Puskesmas Klangenan tahun 2026, wilayah Kecamatan Klangenan didukung oleh sebanyak 66 unit posyandu aktif yang tersebar di seluruh desa, dengan total 200 orang kader posyandu yang bertugas sebagai ujung tombak pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita di lapangan. Meskipun jumlah posyandu dan kader tersebut tergolong cukup banyak, keberadaannya belum sepenuhnya menjamin efektivitas program percepatan penurunan stunting apabila tidak disertai dengan kapasitas, kompetensi, dan koordinasi yang memadai antar seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa (Klangenan, 2026).

Adapun kondisi kasus stunting dan wasting pada balita di setiap desa dalam wilayah Kecamatan Klangenan berdasarkan data hasil pemantauan tumbuh kembang balita yang dilakukan melalui jaringan posyandu tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5
Data Kasus Stunting dan Wasting pada Balita Berdasarkan Desa di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

No.	Desa	Stunting	Wasting	Total
1	Jemaras Lor	24	41	65
2	Slangit	20	33	53
3	Kreyo	23	17	40
4	Bangodua	17	33	50
5	Serang	31	19	50
6	Klangenan	31	13	44
7	Danawinangun	56	33	89
8	Pekantingan	49	22	71

No.	Desa	Stunting	Wasting	Total
9	Jemaras Kidul	45	25	70
	Jumlah	**296**	**236**	**532**

Sumber: Data Puskesmas Klangenan (2026)

Berdasarkan data pada Tabel di atas, terlihat bahwa distribusi kasus stunting dan wasting di Kecamatan Klangenan tidak merata di antara desa-desa yang ada. Desa Danawinangun mencatat angka stunting tertinggi dengan 56 balita stunting dan 33 balita wasting, menjadikannya desa dengan beban gizi buruk paling berat di Kecamatan Klangenan dengan total 89 kasus. Posisi kedua ditempati oleh Desa Pekantingan dengan 49 balita stunting dan 22 balita wasting, serta Desa Jemaras Kidul dengan 45 balita stunting dan 25 balita wasting. Secara keseluruhan, jumlah kasus stunting di Kecamatan Klangenan tercatat sebesar 296 balita, sementara kasus wasting mencapai 236 balita, dengan total gabungan sebesar 532 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan gizi pada balita di Kecamatan Klangenan masih cukup serius dan memerlukan intervensi yang terkoordinasi, terstruktur, serta berbasis data yang akurat dari seluruh lini pelaksana program, mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Kecamatan Klangenan, Puskesmas Klangenan, hingga kader posyandu di setiap desa.

Tingginya angka stunting di beberapa desa khususnya Desa Danawinangun, Desa Pekantingan, dan Desa Jemaras Kidul tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang bersifat administratif dan kelembagaan. Dari sisi komunikasi, belum seluruh kader posyandu di desa-desa tersebut menerima informasi teknis program secara merata dan konsisten dari puskesmas. Dari sisi sumber daya, ketersediaan tenaga gizi sebanyak dua orang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat secara intensif. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi program percepatan penurunan stunting berlangsung di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Klangenan.

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokus penelitian ini dengan beberapa alasan mendasar. Pertama, Kecamatan Klangenan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang secara konsisten mencatat kasus stunting dan wasting yang tinggi, dengan Desa Danawinangun, Desa Pekantingan, dan Desa Jemaras Kidul sebagai desa-desa yang memiliki beban kasus paling berat. Kondisi ini menjadikannya lokus yang strategis dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah dari perspektif implementasi program.

Kedua, meskipun Kecamatan Klangenan telah memiliki infrastruktur pelayanan gizi yang cukup memadai dengan 66 posyandu aktif dan 200 kader yang tersebar di seluruh desa angka stunting dan wasting yang masih tinggi mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dengan efektivitas implementasi program di lapangan. Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan administrasi publik yang layak untuk diteliti secara mendalam menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Ketiga, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan dengan menggunakan pendekatan ilmu Administrasi Publik dan kerangka Edwards III. Hal ini membuka ruang penelitian yang signifikan untuk diisi, sehingga hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu kebijakan publik, tetapi juga menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan stunting yang lebih tepat sasaran di Kecamatan Klangenan pada khususnya, dan di Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sesungguhnya telah menunjukkan kesungguhan dalam merespons persoalan stunting melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan secara bertahap. Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah diterbitkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang strukturnya berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan, sebagai wujud keseriusan pemerintah

dalam menggerakkan seluruh lini birokrasi untuk bersama-sama bekerja menurunkan angka stunting. Selain itu, pemerintah kabupaten juga telah melaksanakan konvergensi intervensi melalui berbagai program gizi spesifik dan gizi sensitif yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara lintas sektor. Namun demikian, keberadaan regulasi dan komitmen di tingkat kabupaten saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan program apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang efektif, terstruktur, dan terukur di tingkat kecamatan sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari perspektif keilmuan Administrasi Publik, tahap implementasi merupakan fase paling krusial dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Implementasi adalah proses di mana sebuah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan, dan pada tahap inilah dapat diketahui apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan ataukah justru mengalami berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu kerangka analisis yang paling banyak digunakan dalam kajian implementasi kebijakan publik adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Menurut Edwards III (Agustino 2016), keberhasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama yang bekerja secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai seberapa jauh sebuah kebijakan dapat dijalankan secara efektif oleh para pelaksananya di lapangan.

Pertama, dari sisi komunikasi, kelancaran arus informasi dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana di lapangan merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya sebuah program secara efektif. Komunikasi yang baik mencakup tiga hal pokok: transmisi informasi yang tepat dan akurat kepada seluruh pihak yang berkepentingan, kejelasan pesan yang diterima oleh para pelaksana, serta konsistensi arahan yang diberikan dari waktu ke waktu. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa hambatan dalam aspek komunikasi kerap menjadi salah satu faktor dominan yang melemahkan implementasi program percepatan penurunan stunting di tingkat bawah. Masih ditemukannya ketidakseragaman

pemahaman di antara pelaksana program, serta perubahan instruksi yang tidak dikomunikasikan secara merata, menjadi sumber kebingungan yang berujung pada ketidakoptimalan pelaksanaan. Di Kecamatan Klangenan, kondisi serupa diduga turut berkontribusi terhadap belum meratanya jangkauan program kepada seluruh sasaran yang seharusnya menerima manfaat.

Kedua, dari sisi sumber daya, ketersediaan dan kecukupan sumber daya merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas implementasi. Edwards III (Widodo 2011) menegaskan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat. Sumber daya mencakup empat dimensi utama: sumber daya manusia yang kompeten, informasi yang dibutuhkan pelaksana, kewenangan yang memadai untuk menjalankan tugas, serta fasilitas dan sarana pendukung. Dalam konteks program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, kesenjangan antara jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dengan beban wilayah yang harus dilayani, rendahnya kapasitas sebagian kader dalam mengoperasikan sistem pelaporan seperti e-PPGBM, serta keterbatasan anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menjadi hambatan nyata yang melemahkan efektivitas program di lapangan.

Ketiga, dari sisi disposisi, sikap dan orientasi para pelaksana terhadap kebijakan yang mereka emban memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas implementasi di lapangan. Disposisi merujuk pada sejauh mana para pelaksana memiliki kemauan, keyakinan, dan komitmen yang tulus untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Apabila disposisi pelaksana bersifat positif dan mendukung, maka kemungkinan besar implementasi akan berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, apabila disposisi bersifat negatif atau apatis, maka kebijakan berisiko tidak terlaksana sebagaimana mestinya (Agustino 2016). Dalam pelaksanaan program stunting, disposisi yang belum optimal juga tercermin dari masih adanya keluarga sasaran yang tidak mau mengakui kondisi stunting yang dialami anaknya meskipun kondisi ekonominya terbilang mampu. Fenomena ini antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan pola asuh yang

kurang tepat, yang seharusnya bisa diatasi melalui pendekatan yang lebih persuasif dan personal oleh para pelaksana program di lapangan.

Keempat, dari sisi struktur birokrasi, kejelasan prosedur kerja dan kualitas koordinasi antar lembaga pelaksana menjadi faktor penentu yang sangat kritis dalam implementasi program lintas sektor seperti percepatan penurunan stunting. Struktur birokrasi yang efektif dicirikan oleh dua hal utama: pertama, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terperinci, dan dipahami oleh seluruh pelaksana di lapangan; dan kedua, minimnya fragmentasi atau tumpang tindih tugas dan wewenang antar lembaga yang terlibat dalam program. Namun dalam praktik di lapangan, penerapan SOP sering kali menemui kendala, antara lain karena sebagian pelaksana belum sepenuhnya memahami isi dan alur prosedur yang ditetapkan. Sementara itu, koordinasi antar instansi seperti Puskesmas, BKKBN, Dinas Sosial, PKK, dan pemerintah desa yang seharusnya berjalan secara sinergis dalam program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan, masih kerap menghadapi hambatan dalam hal sinkronisasi data, jadwal kegiatan, dan pembagian peran yang belum sepenuhnya jelas dan terstruktur.

Beberapa kajian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai dinamika implementasi program percepatan penurunan stunting di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan terhadap program penurunan stunting di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori Edwards III menunjukkan bahwa meskipun berbagai program telah dilaksanakan, tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan koordinasi birokrasi masih menjadi hambatan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Penelitian lain mengenai Program Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Binjai mengungkapkan bahwa meskipun disposisi pelaksana tergolong positif, keterbatasan pendanaan dan lemahnya koordinasi antarkelembagaan tetap menjadi batu sandungan dalam menjangkau seluruh sasaran secara efektif. Berbagai temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan serupa sangat mungkin juga terjadi di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi program percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut menggunakan kerangka teori

Edwards III. Hal inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi melalui penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan gambaran yang telah dipaparkan di atas, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah dirumuskan di tingkat nasional maupun daerah dengan realitas implementasinya di tingkat kecamatan. Kesenjangan ini berdimensi administratif dan kelembagaan: komunikasi program yang belum optimal antar instansi, keterbatasan sumber daya pelaksana di lapangan, SOP yang belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara sinergis. Kondisi inilah yang mendorong perlunya kajian ilmiah yang mendalam dan berbasis data empiris untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai implementasi program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) sebagai kerangka analisis yang berfokus pada empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemilihan keempat indikator tersebut didasarkan pada relevansinya yang tinggi dalam menggambarkan dinamika pelaksanaan program di tingkat kecamatan secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: "Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan analisis yang mendalam mengenai bagaimana program tersebut dijalankan di lapangan, serta menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya mempercepat penurunan

angka stunting di Kecamatan Klangenan khususnya, dan Kabupaten Cirebon pada umumnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyampaian informasi terutama dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi antara pemerintah dengan pelaksana di lapangan.
2. Ketersediaan sumber daya dalam implementasi program percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya mendukung secara optimal, terutama dari aspek staf, kewenangan dan fasilitas pendukung.
3. Pelaksana program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan belum sepenuhnya menunjukkan sikap dan komitmen yang konsisten dalam mendukung implementasi program di lapangan.
4. Penerapan SOP dan koordinasi antarorganisasi dalam implementasi program percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan Klangenan belum berjalan secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

Bagaimana implementasi program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon?

Adapun sub-rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Klangenan ditinjau dari transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi program ditinjau dari staf, kewenangan dan fasilitas pendukung?

3. Bagaimana disposisi pelaksana dalam implementasi program ditinjau dari sikap, komitmen dan kesesuaian penempatan pelaksana?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi program ditinjau dari SOP dan koordinasi antarorganisasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis komunikasi dalam implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Klangenan ditinjau dari transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sumber daya dalam implementasi program ditinjau dari staf, kewenangan dan fasilitas pendukung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis disposisi pelaksana dalam implementasi program ditinjau dari sikap, komitmen dan kesesuaian penempatan pelaksana.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur birokrasi dalam implementasi program ditinjau dari SOP dan koordinasi antarorganisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam

bidang implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan program kesehatan masyarakat di tingkat pemerintahan daerah.

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan berperan dalam keberhasilan implementasi program yang bersifat lintas sektor.

2. Manfaat secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Klangenan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, khususnya dalam aspek komunikasi, pengelolaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam memperbaiki koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kader, serta optimalisasi pelaksanaan program intervensi stunting di lapangan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kecamatan Klangenan, mengenai pentingnya program percepatan penurunan stunting serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam mengkaji implementasi program secara langsung di lapangan, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Administrasi Publik

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul penelitian mengenai ”Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon". Sehingga peneliti mengambil teori mengenai Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan.

Penelitian ini berpijak pada disiplin ilmu Administrasi Publik sebagai landasan utama. Waldo (1955) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai organisasi dan manajemen manusia beserta peralatannya guna mencapai tujuan

pemerintahan, sementara Henry (2004) menekankan bahwa Administrasi Publik merupakan kombinasi teori dan praktik yang mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kecamatan Klangenan mengemban tanggung jawab administratif dalam mengelola dan mengkoordinasikan program percepatan penurunan stunting di wilayahnya berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Administrasi Publik berkaitan erat dengan kebijakan publik sebagai produk utama aktivitas pemerintahan. Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan Dunn (2003) menyebutnya sebagai serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Program percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, merupakan wujud nyata kebijakan publik pemerintah di bidang kesehatan, yang menegaskan bahwa penanganan stunting bersifat lintas sektor dan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dari pusat hingga desa melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Berdasarkan kerangka teori di atas, alur berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tingginya angka stunting di Kabupaten Cirebon mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan publik melalui Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai program di tingkat kecamatan. Efektivitas pelaksanaan program tersebut dikaji melalui empat indikator teori Edwards III guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Edwards III (1980) dalam Agustino (2016)